

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, S. (2016). *Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LeIP.
- Alfitra. (2022). *Tata Aturan Tindak Pidana Korupsi*. Raih Asa Sukses.
- Andrisman, T. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Danil, E. (2016). *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Rajawali Press.
- Dwi Cahyani, T. (2021). *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif Dan Islam*. Penerbit Samudra Biru.
- E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang. (2011). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Badan Hukum, Alumni.
- Hamzah, A. (2002). *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Hamzah, Andi. (2006). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, E. (2008). *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.
- Hasbullah F.Sjawie. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana Predana Media Group.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Merpaung, L. (2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Muis, A. (2021a). *PEMBERANTASAN KORUPSI* (A. Budiman (ed.)).
- Muis, A. (2021b). *pemberantasan korupsi fungsi dan kewenangan kepolisian negara republik indonesia dalam tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara di indonesia* (A. Budiman (ed.)).
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Alumni.
- ND, M. F., & Achma, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, T., Handayani, & Karo. (2015). *Hukum Acara Pidana Reorientasi Pemikiran Teori Keadilan Bermartabat*. Penerbit K-Media.
- Putra, R. P. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish Publisher.
- Sijabat, T. S. M. (2022). *Masalah Suap sebagai Tindak PIDana Korupsi*. PT Alumni.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.
- Yurizal. (2017). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Nusa Creative.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden No. 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan
Korupsi (Stranas PK)

Sumber Lain

Junal

Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322–336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>

Hazmi, R. M. (2021). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23–45. <http://dx.doi.org/10.29406/rj.v4i1.2687>

Mappanturu, A. M. D. (2023). Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Elements Of Enriching And Benefiting Yourself, Others Or Corporations In Criminal Acts Of Corruption. *Jurnal Media Hukum*, 9(2), 59–69. <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/430>

Pradika, D. H., Sukinta, S., & Cahyaningtyas, I. (2022a). Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33608>

Pradika, D. H., Sukinta, S., & Cahyaningtyas, I. (2022b). Tinjauan Tentang Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33608>

Putri. D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).

Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125–142. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.120>

Sagio, I. (2017). Penafsiran Unsur “Memperkaya Diri” Dan “Kerugian Negara.” *Jurnal Yudisial*, 3(1), 78–92.

Saragi, D. L., Syahputra, R., & Yasid, M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Dalam Perkara Korupsi.No Title. *Jurnal Retentum*, 3.

Siregar, M. (2022). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Memperkaya Diri Sendiri Yang Dilakukan Asn (Aparatur Sipil Negara) Studi Putusan Nomor 64/PID.SUSTPK/2020/PNMDN*.<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/7336>

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Sugiantari, A. A. P. W. (2017). Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Penggunaan Wewenang oleh Pejabat Publik. *Jurnal Advokasi*, 7(1). <https://web.archive.org/>

Internet

Anang Fajrul U. <https://www.pojokwacana.com/memahami-teori-tiga-nilai-hukum-gustav-radbru>

Detiknews, "Kasus Korupsi Dana BOS Afirmasi Pandeglang Segera Disidangkan" <https://news.detik.com/berita/d-6542386/kasus-korupsi-dana-bos-afirmasi-pandeglang-segera-disidangkan>.

Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Februari 2023, Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022 diakses pada laman <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Tahun%202022.pdf>

Indonesia Corruption Watch (ICW), Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022, diakses pada laman <https://antikorupsi.org/index.php/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022>